



**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO**
KABUPATEN PASER MENURUT PENGELUARAN
2015 – 2019



The central graphic is a large black circle containing white text. It is surrounded by various black icons: a clock, a truck, a factory, a crane, and a bar chart with an upward arrow. The background is white with a black diagonal shape in the top-left corner and a grey curved shape at the bottom.

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PASER MENURUT PENGELUARAN
2015 – 2019**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PASER
MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2015 – 2019**

ISSN: 2686-4142

Nomor Publikasi: 64010.2004

Katalog: 9302020.6401

Ukuran Buku: 21,0 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 66 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Gambar kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dicetak oleh:

CV. Suvi Sejahtera

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Hotbel Purba, SST

Penyunting:

Uci Yumanda Rizki, SST

Penulis:

Willy Onesimus Siagian, S.Tr.Stat

Pengolah Data:

Willy Onesimus Siagian, S.Tr.Stat

Tata Letak dan Gambar Kulit:

Dhyandra Raka Prawira, S.Tr.Stat

Willy Onesimus Siagian, S.Tr.Stat

<https://pase.kubhps.go.id>

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019 merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir Kabupaten Paser. Pendekatan ini dirinci menurut beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto (Ekspor dikurangi dengan Impor).

Data yang digunakan dalam penghitungan komponen PDRB menurut Pengeluaran diperoleh dari dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun pihak swasta, juga data yang bersumber dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan publikasi ini dapat membantu pihak perencana daerah, para analis, lembaga/instansi pemerintah lainnya serta pihak swasta.

Disadari dalam penerbitan publikasi ini, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat penyempurnaan pada penerbitan yang akan datang. Dengan demikian saran dan kritik dari berbagai pihak selalu kami harapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Tana Paser, Mei 2020

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Paser,



Hotbel Purba, SST

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	4
1.3 Perubahan Tahun Dasar	5
BAB II Metode Estimasi dan Sumber Data	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga	14
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	23
2.6 Ekspor dan Impor	27
BAB III Tinjauan Perekonomian Kabupaten Paser, 2015 – 2019	29
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran	31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	38
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	40
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	40
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	42
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	43
3.7 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	44
BAB IV Perkembangan Agregat PDRB Kabupaten Paser, 2015 – 2019	47
4.1 PDRB (Nominal)	49
4.2 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	50
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	51

BAB V	Penutup	53
Lampiran	57

<https://paserkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019	32
Tabel 2. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019	33
Tabel 3. Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2015-2019	35
Tabel 4. Distribusi PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019.....	35
Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019.....	37
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2015 – 2019.....	38
Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Paser, 2015 – 2019	40
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser, 2015 – 2019	41
Tabel 9. Perkembangan PMTB Kabupaten Paser, 2015 – 2019	42
Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Paser, 2015 – 2019	43
Tabel 11. Perkembangan Ekspor Neto Kabupaten Paser, 2015 – 2019	45
Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Paser, 2015 – 2019	49
Tabel 13. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Paser, 2015 – 2019.....	50
Tabel 14. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB, 2015 – 2019.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB Menurut Pengeluaran	6
Gambar 2. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019	32
Gambar 3. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Triliun Rp)	33
Gambar 4. Perbandingan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Triliun Rp) ...	34
Gambar 5. Distribusi PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019 (Persen)	37
Gambar 6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen)	38

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Juta Rupiah).....	59
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Juta Rupiah).....	60
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen).....	61
Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen).....	62
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen).....	63
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen).....	64
Lampiran 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019.....	65
Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen).....	66



PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estat; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi subkategori-subkategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; (4) pembentukan modal tetap domestik bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar wilayah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3 PERUBAHAN TAHUN DASAR

Perubahan tahun dasar (*Rebasing*) adalah proses penetapan kembali tahun dasar baru yang digunakan dalam pengukuran PDB. Perubahan tahun dasar perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem perdagangan internasional, dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

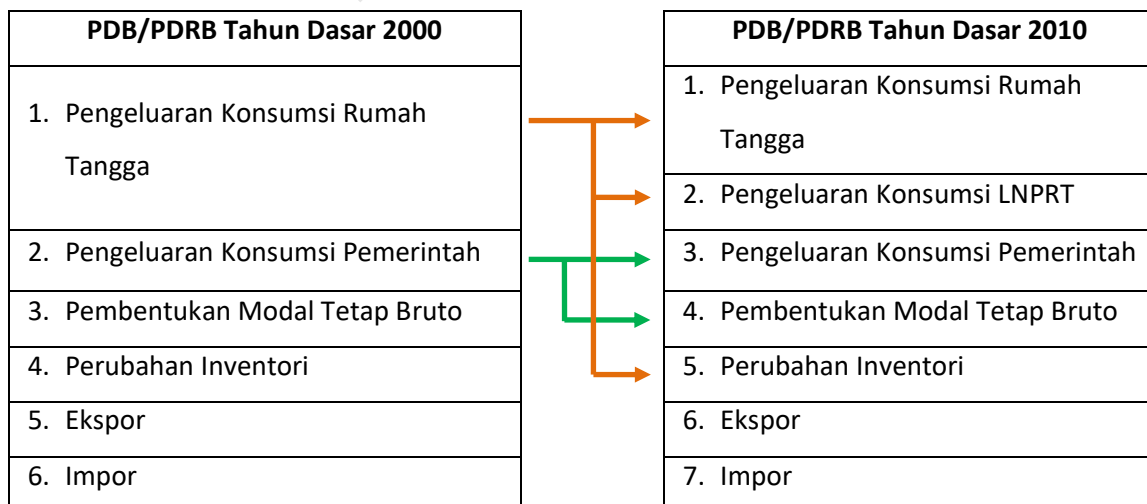
Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB dari tahun 2000 menjadi 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts* (SNA) 2008. Perubahan tahun dasar dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Sebagaimana disebutkan bahwa perubahan tahun dasar mengacu pada SNA 2008. SNA 2008 atau Sistem Neraca Nasional 2008 adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas ekonomi dalam hal produksi, konsumsi, dan akumulasi harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami. Dalam sejarahnya, SNA 2008 merupakan versi yang kelima, dimana versi sebelumnya adalah SNA 1947, SNA 1953, SNA 1968, dan SNA 1993.

Dalam SNA 2008 terdapat 118 revisi dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Perubahan SNA 2008 mencakup perubahan konsep dan cakupan, metodologi, valuasi, dan penggunaan klasifikasi. Klasifikasi PDB/PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak perubahan. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB Menurut Pengeluaran



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perubahan tahun dasar PDB/PDRB memiliki manfaat antara lain:

1. Menginformasikan perekonomian nasional/regional terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas PDB/PDRB;
3. Menjadikan data PDB dapat diperbandingkan secara internasional.

Selanjutnya perubahan harga tahun dasar juga akan memberikan beberapa dampak, antara lain:

1. Meningkatnya nominal PDB/PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan dan pergeseran struktur ekonomi;
2. Akan mengubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
3. Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Sementara itu pemilihan tahun 2010 sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

1. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
4. Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index/PPI*);
6. Tersedianya kerangka kerja *Supply and Use Table (SUT)* yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB.

Penjelasan lebih rinci terkait dengan perubahan tahun dasar 2010 bisa dilihat pada publikasi PDRB Kabupaten Paser menurut Lapangan Usaha.



**METODE ESTIMASI
DAN
SUMBER DATA**

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik;
3. Pakaian dan alas kaki;
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya;
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin;
6. Kesehatan;
7. Angkutan;
8. Komunikasi;
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel;

12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
4. Kesehatan dan Pendidikan;
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya;
6. Hotel dan Restoran;
7. Lainnya.

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
2. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
3. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
4. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT ini, yaitu:

1. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (tidak diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran

konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PK-RT Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- 1) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan;
- 2) Jumlah penduduk pertengahan tahun;
- 3) Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu;
- 4) Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besaran PK-RT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-RT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PK-RT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Estimasi PK-RT hasil Susenas:

- a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
- 2) Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
 - 3) Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
 - 4) Diperoleh nilai PK-RT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
 - 5) Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
 - 6) PK-RT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPR merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPR) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

1. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
2. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;

3. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
4. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
5. Istilah non profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan, pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lainnya, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll;
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya;
- c. Penyusutan;
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-LNPRT bersumber dari:

- 1) Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SK-LNP)
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- 2) Hasil *updating* direktori LNPRT
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- 3) Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- 2) Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan

yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) kabupaten/kota mencakup:

- a. PK-Pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota bersangkutan;
- b. PK-Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. PK-Pemerintah provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/kota;
- d. PK-Pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/kota;

iv. Penghitungan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P tahunan adalah:

- 1) Data realisasi APBN Tahunan (Kementerian Keuangan)
- 2) Data realisasi APBD Tahunan (BPKAD)
- 3) Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- 4) Output Bank Indonesia (BI)
- 5) Gaji Pegawai Negeri Sipil (Kementerian Keuangan dan BPKAD)
- 6) Indeks Harga dan Indeks Upah (BPS)

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P atas dasar harga berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/kota, PK-P kabupaten/kota atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Investasi meliputi investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup

pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri dari BPS

provinsi/kabupaten/kota.

- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi).
- d. Laporan Keuangan Perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang

perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di-"deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. PMTB dalam bentuk bangunan, dihitung dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (atas dasar harga berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di-"reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia, dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB

atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BPH Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaikinya diperlukan survei dalam skala yang besar;
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh;
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan Inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku maupun bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan,

perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari hasil kegiatan survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- c. Data komoditas pertambangan dari Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih; dan
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- b. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- c. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan: a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah sebagai berikut:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor dan impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor barang dan jasa ke luar negeri/propinsi/kabupaten/kota tersebut;
- b. Impor barang dan jasa dari luar negeri/propinsi/kabupaten/kota tersebut;

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya. Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

1. Sumber Data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi/kabupaten/kota di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi/kabupaten/kota dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



**TINJAUAN EKONOMI
KABUPATEN PASER,
2015 – 2019**

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PASER MENURUT PENGELUARAN

Pada tahun 2019, secara nominal PDRB Kabupaten Paser mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku sebesar 48,18 triliun rupiah pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 48,28 triliun rupiah. Penurunan 0,10 triliun rupiah tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komponen utama penghitungan PDRB Pengeluaran serta adanya perubahan volume pengeluaran. Meskipun Komponen Konsumsi Rumah tangga, Konsumsi LNPRT, dan Konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan, namun peningkatan pengeluaran tersebut tidak sebanding dengan penurunan nilai Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan Net Ekspor.

Komponen yang mengalami penurunan paling signifikan yaitu Komponen PMTB. Komponen ini mengalami penurunan sebesar 0,42 triliun rupiah, yaitu dari 9,81 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 9,39 triliun rupiah pada tahun 2019. Selanjutnya, Komponen Net Ekspor juga mengalami penurunan 0,25 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya, dari 30,97 triliun rupiah di tahun 2018 menjadi 30,72 triliun rupiah di tahun 2019. Komponen Perubahan Inventori juga mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 94,43 miliar rupiah menjadi 47,12 miliar rupiah di tahun 2019.

Di lain sisi masih terdapat beberapa komponen yang mengalami peningkatan, diantaranya Komponen Konsumsi Rumah tangga, Konsumsi Pemerintah, serta Konsumsi LNPRT. Konsumsi Rumah Tangga mengalami peningkatan sebesar 0,38 triliun rupiah, dari tahun sebelumnya 2018 sebesar 5,89 triliun rupiah menjadi 6,27 triliun rupiah pada tahun 2019. Konsumsi Pemerintah juga mengalami peningkatan dari 1,45 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 1,68 triliun rupiah pada tahun 2019. Selanjutnya, Konsumsi LNPRT juga mengalami peningkatan sebesar 7,20 miliar rupiah.

Perkembangan PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku menurut komponen pengeluaran periode 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019

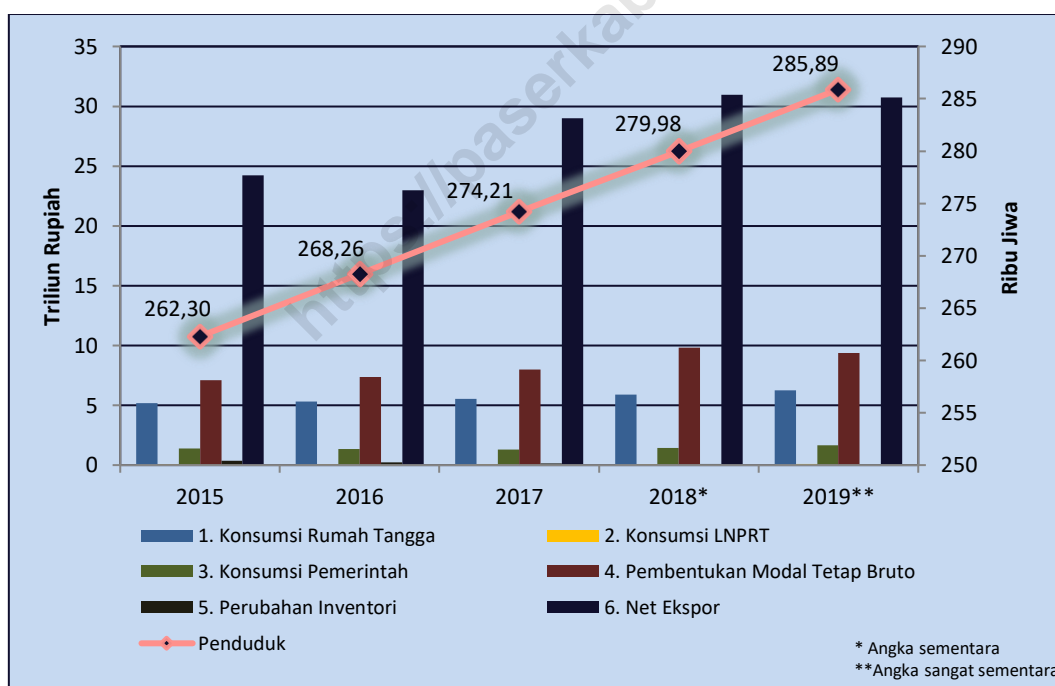
(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5 163,39	5 316,15	5 521,28	5 886,53	6 268,80
2. Konsumsi LNPRT	60,92	60,53	64,83	72,68	79,88
3. Konsumsi Pemerintah	1 401,21	1 363,78	1 280,00	1 450,55	1 675,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 107,95	7 344,86	7 983,04	9 806,59	9 388,43
5. Perubahan Inventori	363,65	228,92	127,61	94,43	47,12
6. Net Ekspor	24 212,16	22 975,44	28 977,49	30 969,35	30 716,15
PDRB	38 309,28	37 289,69	43 954,25	48 280,13	48 175,70

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 2. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019



Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang direvaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga

konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama pada peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga konstan 2010 periode 2015 – 2019 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Gambar 3 berikut ini.

Tabel 2. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019

(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 894,77	3 806,89	3 820,80	3 953,71	4 095,36
2. Konsumsi LNPRT	46,57	43,72	45,43	49,25	51,86
3. Konsumsi Pemerintah	894,34	810,33	752,48	835,61	960,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5 790,43	5 620,19	5 942,99	7 146,94	6 510,47
5. Perubahan Inventori	308,52	195,16	101,73	69,92	36,20
6. Net Ekspor	23 538,24	22 279,22	22 474,22	22 300,99	24 035,82
PDRB	34 472,88	32 755,52	33 137,65	34 356,41	35 690,12

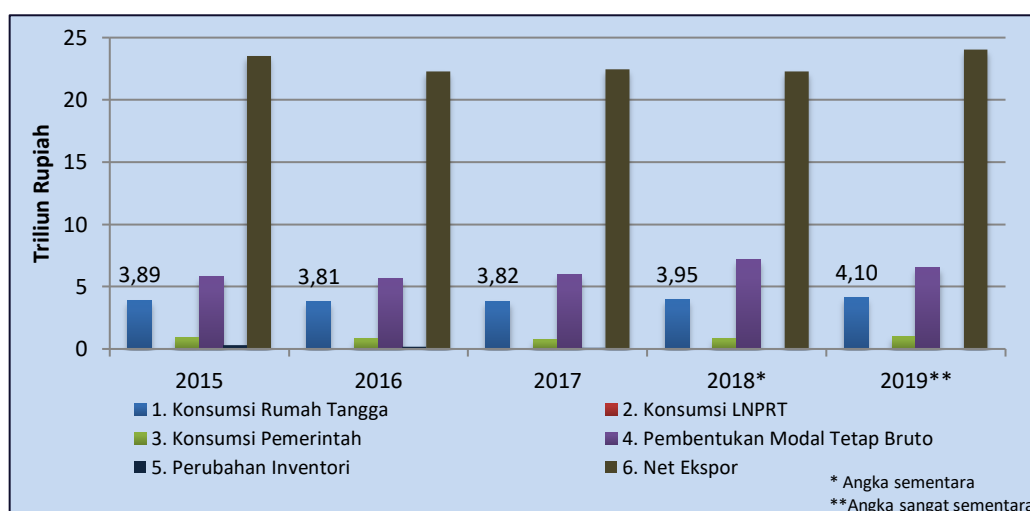
Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

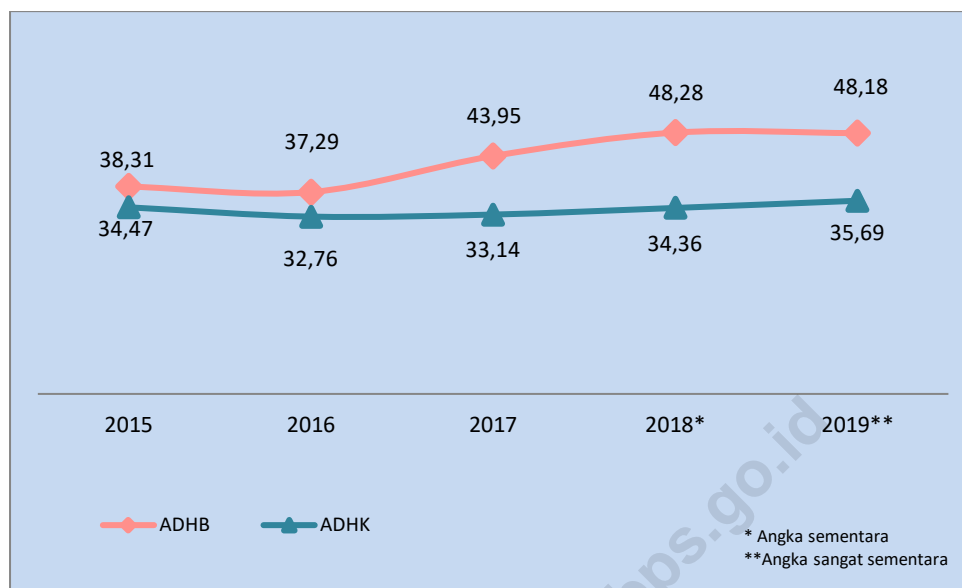
Dari Tabel 2, terlihat bahwa pada tahun 2019 nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 34,36 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 35,69 triliun rupiah pada tahun 2019. Dan dari Gambar 3, dapat dilihat selama beberapa tahun terakhir, Komponen Konsumsi Rumah Tangga cenderung meningkat setiap tahunnya.

Gambar 3. PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Triliun Rupiah)



Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

Gambar 4. Perbandingan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Triliun Rupiah)



Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

Dari Gambar 4 dapat dilihat pergerakan PDRB Pengeluaran baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir. PDRB atas dasar harga berlaku cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dengan kondisi pada tahun 2019 mengalami penurunan. Begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan tren yang meningkat meskipun nilainya tidak pernah melebihi PDRB atas dasar harga berlaku. Hal ini dikarenakan PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga yang sesuai tahun bersangkutan dimana tiap tahun terdapat perubahan harga sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun konstan dalam hal ini tahun 2010.

Perubahan harga yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Paser khususnya atas dasar harga berlaku dapat dijelaskan melalui Laju Indeks Implisit yang disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,38	5,34	3,48	3,03	2,81
2. Konsumsi LNPRT	5,71	5,82	3,06	3,44	4,35
3. Konsumsi Pemerintah	16,37	7,42	1,07	2,05	0,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,64	6,46	2,79	2,15	5,10
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	-1,52	2,44	16,51	5,95	-3,95

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Laju Indeks Implisit merupakan salah satu Indikator turunan PDRB yang didapat dengan membandingkan Indeks Implisit tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Indeks harga implisit PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Indeks implisit digunakan untuk melihat inflasi dari sisi perekonomian secara makro.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Laju Indeks Implisit mengalami kontraksi sebesar 3,95 persen artinya harga PDRB pengeluaran pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Hal ini juga yang menyebabkan penurunan nilai PDRB atas dasar berlaku secara total meskipun PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Untuk melihat Indeks Implisit secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 4. Distribusi PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13,48	14,26	12,56	12,19	13,01
2. Konsumsi LNPRT	0,16	0,16	0,15	0,15	0,17
3. Konsumsi Pemerintah	3,66	3,66	2,91	3,00	3,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,55	19,70	18,16	20,31	19,49
5. Perubahan Inventori	0,95	0,61	0,29	0,20	0,10
6. Net Ekspor	63,20	61,61	65,93	64,15	63,76
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

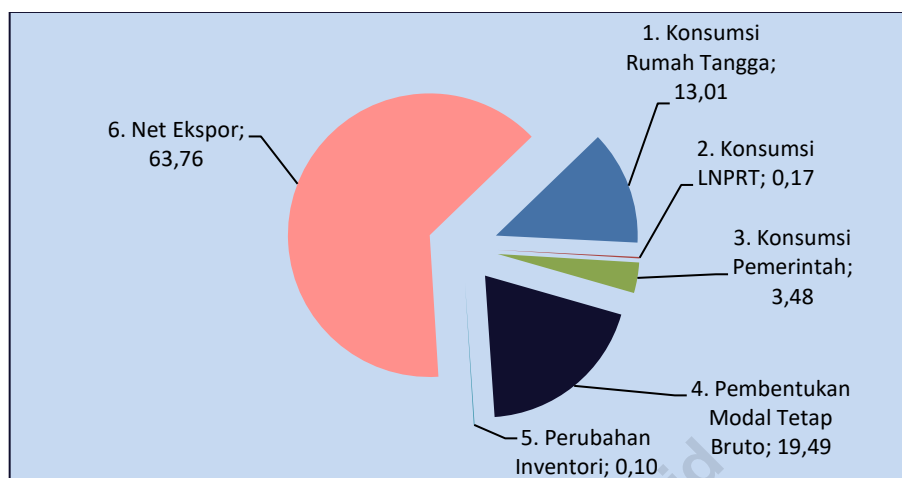
Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa selama periode 2015 – 2019, PDRB Kabupaten Paser dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan distribusinya, yaitu :

1. Komponen yang memiliki kontribusi terbesar yaitu Net Ekspor. Komponen ini sangat berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paser. Pada tahun 2015 – 2019 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh Komponen Ekspor Impor, menunjukkan ekspor yang lebih tinggi dari impor, sehingga menunjukkan kondisi surplus selama periode tersebut.
2. Komponen yang memiliki kontribusi sedang yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT). Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 18,16 sampai 20,31 persen selama periode tersebut. Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) memiliki kontribusi sebesar 12,19 sampai 14,26 persen selama periode 2015 – 2019. Hal ini menunjukkan bahwa peran rumah tangga dalam menyerap produk domestik cukup besar.
3. Komponen yang memiliki kontribusi kecil yaitu Konsumsi Akhir Pemerintah, Konsumsi Akhir LNPRT dan Perubahan Inventori, yang hanya berkisar antara 0 sampai 4 persen. Ini menunjukkan bahwa kontribusi dari pemerintah, LNPRT, dan perubahan inventori tidak signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paser.

Untuk lebih jelasnya distribusi PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran pada tahun 2019, dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Distribusi PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019 (Persen)



Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dari Tabel 5, dapat dilihat kondisi perekonomian Kabupaten Paser menunjukkan tanda semakin membaik pada tahun 2019, ini terlihat dari nilai pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan nilai positif meskipun secara nominal mengalami penurunan seperti yang telah dijelaskan melalui laju indeks implisit diatas. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selama periode 2015 – 2019 adalah -0,89 persen pada tahun 2015; -4,98 persen pada tahun 2016; 1,17 persen pada tahun 2017; 3,68 persen pada tahun 2018; dan 3,88 persen pada tahun 2019. Untuk lebih lengkapnya dari Gambar 6 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode yang sama.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019

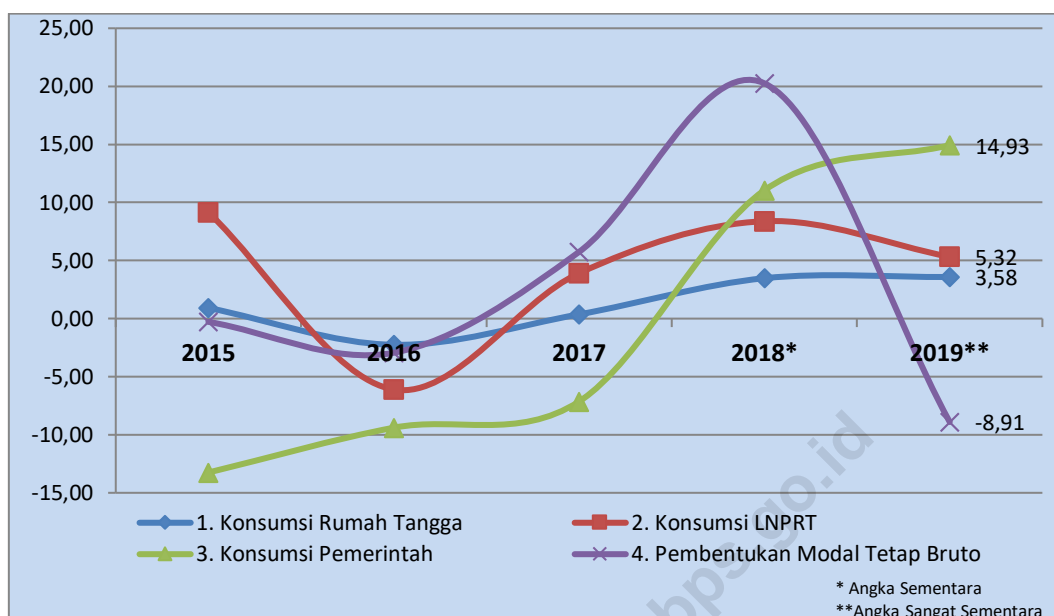
Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	0,92	-2,26	0,37	3,48	3,58
2. Konsumsi LNPRT	9,16	-6,10	3,91	8,39	5,32
3. Konsumsi Pemerintah	-13,25	-9,39	-7,14	11,05	14,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,28	-2,94	5,74	20,26	-8,91
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	-0,89	-4,98	1,17	3,68	3,88

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen)



Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati posisi ketiga dalam pembentukan PDRB Kab. Paser menurut pengeluaran dibawah Net Ekspor dan PMTB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	5 163,39	5 316,15	5 521,28	5 886,53	6 268,80
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3 894,77	3 806,89	3 820,80	3 953,71	4 095,36
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	13,48	14,26	12,56	12,19	13,01
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	19 684,96	19 817,10	20 135,53	21 025,21	21 927,00
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	14 848,46	14 190,98	13 934,04	14 121,66	14 324,76
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	0,92	-2,26	0,37	3,48	3,58
b. Perkapita	-1,44	-4,43	-1,81	1,35	1,44
Jumlah penduduk	262 301	268 261	274 206	279 975	285 894

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 – 2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan secara nominal (atas dasar harga berlaku), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Terjadi peningkatan kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2019 setelah dua tahun sebelumnya mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2019 mengalami peningkatan namun peningkatan kontribusi tersebut tidak setinggi pada tahun 2016. Pada tahun 2015 kontribusi rumah tangga mencapai 13,48 persen dan terus meningkat menjadi 14,26 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB mengalami penurunan menjadi 12,56 persen, pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 12,19 persen, dan pada tahun 2019 kontribusi rumah tangga mengalami peningkatan menjadi 13,01 persen.

Meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya daya beli. Hal ini akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) mendorong kenaikan belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap penduduk di Kabupaten Paser menghabiskan dana sekitar 19,68 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi berupa makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran tersebut terus meningkat hingga mencapai 21,93 juta rupiah pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Paser meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan sebesar 0,92 persen pada tahun 2015. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan hingga -2,26 persen pada tahun 2016. Kemudian untuk tiga tahun berikutnya kembali membaik dengan pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 0,37 persen dan 3,48 persen pada tahun 2018, serta 3,58 persen pada tahun 2019. Seiring dengan pertumbuhan total konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi per kapita juga

mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2015 pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita sebesar -1,44 persen, menurun hingga -4,43 persen pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi sebesar 1,81 persen. Pada tahun 2018 konsumsi rumah tangga per kapita semakin baik dengan tumbuh sebesar 1,35 persen dan tahun 2019 kembali meningkat dengan pertumbuhan konsumsi sebesar 1,44 persen.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peran konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Dalam lima tahun terakhir kontribusi Konsumsi LNPRT terhadap PDRB atas dasar harga berlaku hanya mencapai 0,15 persen hingga 0,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi LNPRT dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Pada Tabel 7 berikut dapat dilihat peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB. Konsumsi LNPRT dalam lima tahun terakhir secara nominal cenderung meningkat dari 60,92 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 79,88 miliar rupiah pada tahun 2019.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Paser, 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	60,92	60,53	64,83	72,68	79,88
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	46,57	43,72	45,43	49,25	51,86
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,16	0,16	0,15	0,15	0,17
Pertumbuhan (ADHK 2010)	9,16	-6,10	3,91	8,39	5,32

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Paser serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah berfluktuatif secara nominal dan secara riil cenderung menunjukkan peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 1,40 triliun rupiah, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 1.36 triliun rupiah, kembali menurun menjadi 1,28 triliun rupiah pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 1,45 triliun rupiah. Selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 1,68 triliun rupiah.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser, 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 401,21	1 363,78	1 280,00	1 450,55	1 675,32
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	894,34	810,33	752,48	835,61	960,40
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	3,66	3,66	2,91	3,00	3,48
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	5 341,99	5 083,80	4 668,04	5 180,99	5 859,93
b. ADHK 2010	3 409,60	3 020,68	2 744,21	2 984,58	3 359,28
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi pemerintah	-13,25	-9,39	-7,14	11,05	14,93
b. Konsumsi perkapita	-15,28	-11,41	-9,15	8,76	12,55
Jumlah penduduk (jiwa)	262 301	268 261	274 206	279 975	285 894

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Apabila dicermati lebih lanjut terlihat bahwa proporsi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2019 proporsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB meningkat menjadi 3,48 persen dari yang sebelumnya hanya 3 persen pada tahun 2018 dan 2,91 persen pada tahun 2017. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2019, namun peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan proporsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB pada tahun 2016 dan 2015 yaitu sebesar 3,66 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan pada tahun 2019, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per kapita

atas dasar harga berlaku sebesar 5,18 juta rupiah dan meningkat menjadi 5,86 juta rupiah pada tahun 2019.

Gambaran mengenai pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Dari tahun 2015 dengan kontraksi sebesar 13,25 persen terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan peningkatan mencapai 14,93 persen pada tahun 2019. Sejalan dengan pertumbuhan total konsumsi pemerintah, pertumbuhan konsumsi per kapita juga mengalami tren positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan laju pertumbuhan sebesar 12,55 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pada tahun 2019 Komponen PMTB mengalami penurunan nilai nominal dari yang sebelumnya sebesar 9,81 triliun rupiah pada tahun 2018 berkurang menjadi 9,39 triliun rupiah pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi dari Komponen PMTB pada tahun 2019 mengalami kontraksi hingga 8,91 persen.

Tabel 9. Perkembangan PMTB Kabupaten Paser, 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	7 107,95	7 344,86	7 983,04	9 806,59	9 388,43
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5 790,43	5 620,19	5 942,99	7 146,94	6 510,47
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	18,55	19,70	18,16	20,31	19,49
Pertumbuhan PMTB (% ADHK)	-0,28	-2,94	5,74	20,26	-8,91

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan/atau pengurangan (bertanda negatif). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lainnya yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsinya dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Tabel 10. Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Paser, 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	363,65	228,92	127,61	94,43	47,12
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	308,52	195,16	101,73	69,92	36,20
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,95	0,61	0,29	0,20	0,10

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara umum, selama periode 2015 – 2019 nilai perubahan inventori bertanda positif, artinya terjadi penambahan persediaan setiap tahun. Jika dinilai atas dasar harga berlaku penambahan inventori tersebut berada dalam kisaran 47,12 sampai 363,65 miliar rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 penambahan inventori sekitar 36,20 sampai 308,52 miliar rupiah pada periode waktu yang sama. Selama lima tahun terakhir

penambahan inventori menunjukkan tren menurun setiap tahunnya. Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB juga masih dibawah satu persen dalam lima tahun terakhir.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR NETO ANTAR DAERAH

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran konsumsi (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh perekonomian domestik Kabupaten Paser. Untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut industri (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan suatu wilayah terhadap ekonomi atau produk daerah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Paser diluar wilayah Kabupaten Paser, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan.

Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor impor antar kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB atas dasar harga konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara total

PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output bayangan. Dalam metode ini, transaksi ekspor impor dipandang sebagai penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Tabel 11. Perkembangan Ekspor Neto Kabupaten Paser, 2015 — 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Neto					
a. ADHB (Miliar Rp)	24 212,16	22 975,44	28 977,49	30 969,35	30 716,15
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	23 538,24	22 279,22	22 474,22	22 300,99	24 035,82
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	63,20	61,61	65,93	64,15	63,76

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari Tabel 14, dapat dilihat bahwa proporsi Ekspor Neto terhadap PDRB selama lima tahun terakhir selalu berada diatas 60 persen. Untuk tahun 2019, Ekspor Neto atas dasar harga belaku sebesar 30,72 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 secara nominal terjadi penurunan nilai. Namun jika melihat nilai ADHK terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan oleh perubahan Laju Indeks implisit (Indeks harga) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (Tabel 3).



**PERKEMBANGAN
AGREGAT PDRB
KABUPATEN PASER,
2015 – 2019**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Uraian berikut ini akan menyajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan atau dikonsumsi dalam suatu wilayah ekonomi domestik, yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kabupaten Paser, 2015 — 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	38 309,28	37 289,69	43 954,25	48 280,13	48 175,70
- ADHK 2010	34 472,88	32 755,52	33 137,65	34 356,41	35 690,12
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	146 050,83	139 005,28	160 296,47	172 444,45	168 508,96
- ADHK 2010	131 424,87	122 103,16	120 849,47	122 712,44	124 836,89
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	-3,20	-7,09	-1,03	1,54	1,73
Jumlah penduduk (jiwa)	262 301	268 261	274 206	279 975	285 894
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	-0,89	-4,98	1,17	3,68	3,88

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB per kapita Kabupaten Paser secara nominal berfluktuatif dari tahun ke tahun (Tabel 12). Dalam periode lima tahun terakhir, PDRB per kapita terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 139 juta rupiah dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 172 juta rupiah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Paser rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai

per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu, pertumbuhan per kapita secara riil pada tahun 2019 meningkat hingga 1,73 persen. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 1,54 persen.

4.2 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 13. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Paser, 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	5 163,39	5 316,15	5 521,28	5 886,53	6 268,80
b. LNPRT	60,92	60,53	64,83	72,68	79,88
c. Pemerintah	1 401,21	1 363,78	1 280,00	1 450,55	1 675,32
Jumlah	6 625,52	6 740,47	6 866,12	7 409,76	8 024,00
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	38 309,28	37 289,69	43 954,25	48 280,13	48 175,70
Proporsi	17,29	18,08	15,62	15,35	16,66

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada Tabel 13 diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pengeluaran konsumsi akhir pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 16,66 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 15,35 persen. Walaupun meningkat namun proporsi konsumsi akhir pada tahun 2019 masih dibawah proporsi konsumsi akhir tahun 2016 yaitu sebesar 18,08 persen. Adapun pengeluaran konsumsi akhir yang paling besar ialah untuk Pengeluaran Akhir Rumah Tangga setelah itu disusul Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, kemudian yang paling sedikit adalah Konsumsi Akhir LNPRT.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Tabel 14 menunjukkan bahwa produk yang digunakan untuk investasi fisik di Kabupaten Paser lebih besar dibandingkan dengan produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 14. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB, 2015 – 2019

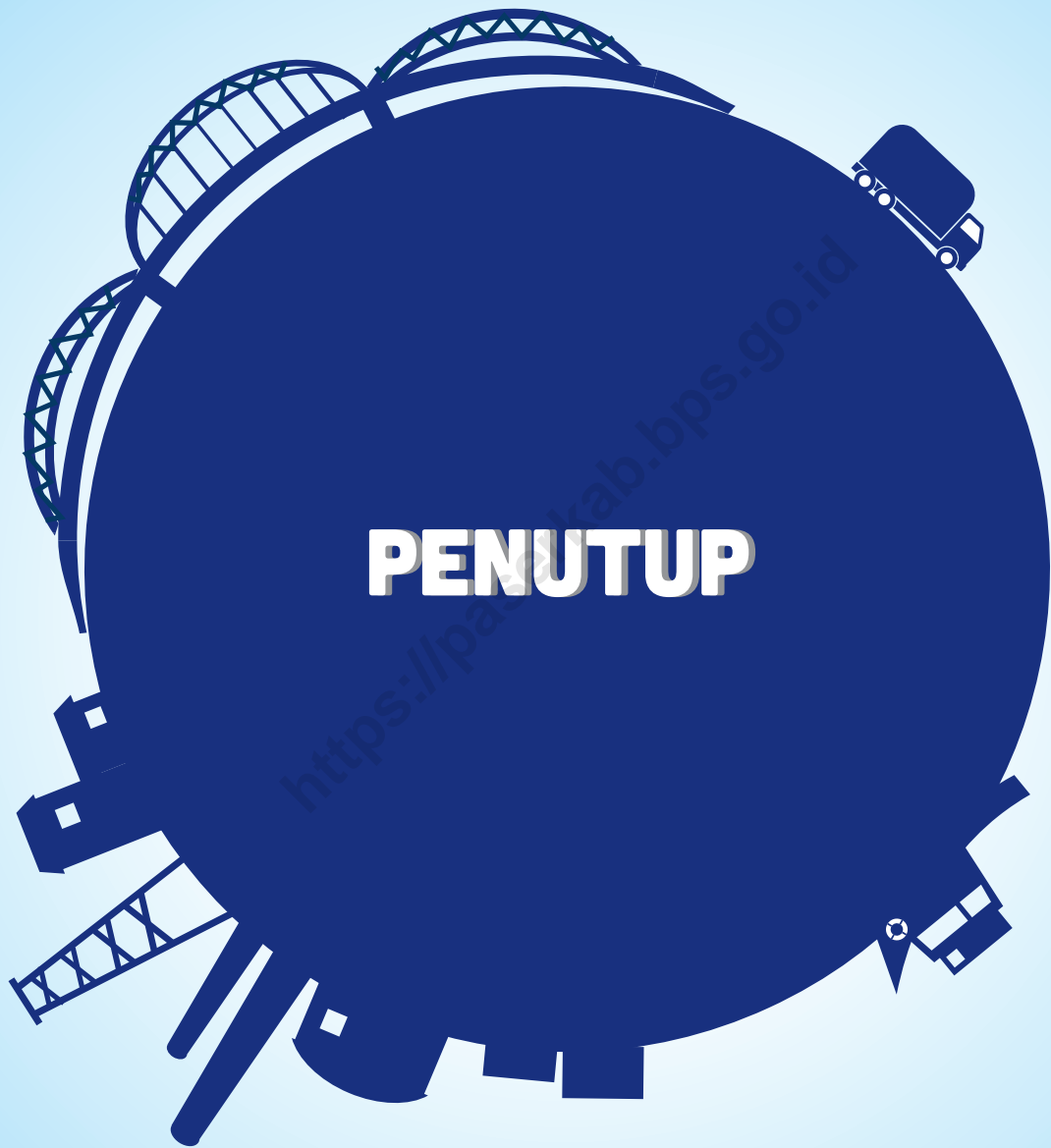
Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rupiah)	5 163,39	5 316,15	5 521,28	5 886,53	6 268,80
Total PMTB (Miliar Rupiah)	7 107,95	7 344,86	7 983,04	9 806,59	9 388,43
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	0,73	0,72	0,69	0,60	0,67

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2015, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 0,73. Tiga tahun berikutnya, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mengalami penurunan, mulai dari 0,72 pada tahun 2016, 0,69 pada tahun 2017, hingga 0,60 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mengalami peningkatan menjadi 0,67. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan pertumbuhan investasi lebih besar dari tahun 2018.



PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 – 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Paser pada periode yang bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Data dapat disajikan dalam bentuk *series data* dari tahun 2015 – 2019, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
3. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser pada tahun 2019 mencapai 48,18 triliun rupiah yang menurun 0,10 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terjadinya penurunan pada beberapa komponen utama pembentuk PDRB Kabupaten Paser.
4. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2019 menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser yang tumbuh positif, yaitu sebesar 3,88 persen.
5. Pertumbuhan ekonomi yang membaik namun terjadi penurunan nilai nominal PDRB Kabupaten Paser tahun 2019 disebabkan oleh Laju Indeks Harga Implisit yang mengalami kontraksi hingga 3,95 persen.
6. Pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB per kapita mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB per kapita sebesar -3,20 persen. Kemudian melemah hingga -7,09 persen pada tahun 2016, mengalami penguatan di tahun 2017 namun tetap kontraksi sebesar -1,03 persen. Selanjutnya, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 1,54 dan 1,73.
7. Proporsi pengeluaran konsumsi akhir bergerak fluktuatif diantara 15,35 hingga 18,08 persen selama periode 2015-2019.

8. Rasio Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB masih kecil yaitu sekitar 0,60 sampai 0,73 selama periode 2015-2019.

<https://paserkab.bps.go.id>



Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 163 385,93	5 316 154,59	5 521 284,06	5 886 532,42	6 268 798,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	60 922,03	60 533,04	64 828,81	72 684,23	79 881,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 401 209,28	1 363 784,51	1 280 004,22	1 450 548,17	1 675 319,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 107 950,65	7 344 863,11	7 983 044,27	9 806 589,35	9 388 433,47
5. Perubahan Inventori	363 648,63	228 917,24	127 606,72	94 426,68	47 115,83
6. Net Ekspor	24 212 161,00	22 975 442,00	28 977 486,76	30 969 352,84	30 716 151,87
P D R B	38 309 277,52	37 289 694,49	43 954 254,84	48 280 133,69	48 175 700,94

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 894 766,30	3 806 887,67	3 820 797,84	3 953 710,68	4 095 363,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	46 566,55	43 724,22	45 434,95	49 245,48	51 864,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	894 340,57	810 330,39	752 479,08	835 608,05	960 396,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5 790 434,07	5 620 192,68	5 942 994,50	7 146 942,38	6 510 473,26
5. Perubahan Inventori	308 524,20	195 164,02	101 727,35	69 916,23	36 199,53
6. Net Ekspor	23 538 243,41	22 279 217,33	22 474 216,97	22 300 991,74	24 035 820,13
P D R B	34 472 875,10	32 755 516,30	33 137 650,69	34 356 414 56	35 690 117,94

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13,48	14,26	12,56	12,19	13,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,16	0,16	0,15	0,15	0,17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,66	3,66	2,91	3,00	3,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,55	19,70	18,16	20,31	19,49
5. Perubahan Inventori	0,95	0,61	0,29	0,20	0,10
6. Net Ekspor	63,20	61,61	65,93	64,15	63,76
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11,30	11,62	11,53	11,51	11,47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,14	0,13	0,14	0,14	0,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,59	2,47	2,27	2,43	2,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,80	17,16	17,93	20,80	18,24
5. Perubahan Inventori	0,89	0,60	0,31	0,20	0,10
6. Net Ekspor	68,28	68,02	67,82	64,91	67,35
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,35	2,96	3,86	6,62	6,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	15,39	-0,64	7,10	12,12	9,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,95	-2,67	-6,14	13,32	15,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,35	3,33	8,69	22,84	-4,26
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
P D R B	-2,40	-2,66	17,87	9,84	-0,22

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,92	-2,26	0,37	3,48	3,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,16	-6,10	3,91	8,39	5,32
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-13,25	-9,39	-7,14	11,05	14,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,28	-2,94	5,74	20,26	-8,91
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
P D R B	-0,89	-4,98	1,17	3,68	3,88

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	132,57	139,65	144,51	148,89	153,07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	130,83	138,44	142,68	147,60	154,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	156,68	168,30	170,10	173,59	174,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	122,75	130,69	134,33	137,21	144,21
5. Perubahan Inventori	117,87	117,29	125,44	135,06	130,16
6. Net Ekspor	102,86	103,12	128,94	138,87	127,79
P D R B	111,13	113,84	132,64	140,53	134,98

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran, 2015 – 2019 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,38	5,34	3,48	3,03	2,81
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,71	5,82	3,06	3,44	4,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,37	7,42	1,07	2,05	0,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,64	6,46	2,79	2,15	5,10
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
P D R B	-1,52	2,44	16,51	5,95	-3,95

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**

Jl. Gajah Mada No. 76 Tana Paser

Telp. : (0543) 21219

Email : bps6401@bps.go.id

Homepage : paserkab.bps.go.id

ISSN 2686-4142



9 772686 414006